

DAFTAR PUSTAKA

Buku

“Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD”, diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), Tim Pengkajian SPKN, Jakarta, 2002.

Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Andi Hamzah, 1991. *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT Gramedia.

-----, 2004. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.

Arya Maheka. 2006. *Mengenal dan Memberantas Korups*. Jakarta: KPK Republik Indonesia.

Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Adtya Bhakti,

----- 2000. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Cet.Ketiga. Semarang: Universitas Diponegoro.

Buku Panduan korupsi, *Pahami Dulu Baru Lawan*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2013.

Gregor Polancik, 2009. *“Empirical Research Method Poster”*. Jakarta.

Hans Kelsen, 2008. *Pengantar Teori Hukum*, terj, Bandung: Nusa Media.

Henk Addink, 2010. *Sourcebook Human Rights and Good Governance*, Asialink Project on Education in Good Governance and Human Rights.



2014. *Mengenal Pilihan-Pilihan Hukum Daerah Untuk Pengakuan Masyarakat Adat Kiat-Kiat Praktis Bagi Pendamping Hukum Rakyat (PHR), Masyarakat Sipil (Pelaku Advokasi) dan Pemimpin Masyarakat Adat*, Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan

Hukum Berbasis Ekologis Perkumpulan HuMa bekerjasama dengan Rights Resource Institute (RRI).

I Gede AB Wiranata, 2005. *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

I Made Widnyana, 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT Ereseo.

I.G.M. Nurdjana, 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Indriyanto Seno Adji, 2006. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.

J.W. Lapatra, 1978. *Analyzing the Criminal Justice Systems*, Lexinton Books, Massachusetts.

Jacobus Perviddy Sollosa, 2005. *Otonomi Khusus Papua: Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI*, Jakarta: Sinar Harapan.

Jeremi Pope, 2003 *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.

-----, 2000. *Confronting Corruption: The Elements of National Integrity System*. Transparency International. London

Juajir Sumardi, 1995. *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kenedi, John, 2020. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan. Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lawrence M. Friedman, 1999. *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, New York: Russel Soge Foundation.

-----, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Sosial Science Perspective)*, terj, Bandung: Nusa Media.

-----, *Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atas Teori-Teori Hukum* (susunan I), judul asli "Legal Theory", 1993, ænerjemah: Mohammad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta: PT Raja rafindo Persada.



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Policy Paper : Pengawasan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa: Problematika Dan Solusi*, LIPI, Jakarta, 2019.

Luhut M.P. Pangaribuan, 2014. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Jakarta: Papasa Sinar Sinanti.

Marc Ance. 1965. *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge & Kegan Paul.

Mardjono Reksodiputro, 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Marwan Effendy, 2005. *Kejaksaan RI- Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Melawan Korupsi Dari Aceh Sampai Papua; 10 Kisah Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia (Kemitraan), 2006.

Modul Tindak Pidana Korupsi, Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019, Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan RI.

Muhammad Erwin, 2012. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muladi, 1998. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Penerbit UNDIP.

P. Lab, Steven, 2010. *Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations*. New York: Lexis Nexis Group.

Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminals Sanctions*, California: Stanford University Press.

P.A.F. Lamintang, 1984. *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menuruf Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.

Rohim, 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Depok: Pena Mukti Media.

Romli Atasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.



Muladi Rangkuti, 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Surabaya: Penerbit Airlangga University Press.

Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto. 1983. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.

Sudikno Mertokusumo, 1996. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.

Syed Hussain Alatas, 1987. *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES.

Theodor Rathgeber, 2006. *Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua Barat, Studi Realitas Sosial dan Perspektif Politis*, Jakarta: Sinar Harapan.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2005.

Disertasi, Tesis, Jurnal, Makalah, Bahan Ajar, Pidato

Achmad Ali, *Sumbangan Pemikiran tentang Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia*. Makalah pada seminar Revitalisasi Nilai-Nilai Kejuangan Membangun Indonesia yang Maju, Sejahtera dan Berkarakter, Bandung pada tanggal 21 Juni 2008.

A. Ahsin Thohari, 2011. *Reorientasi Fungsi legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 4, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kemenkumham,

Aniek Juliarini dan Agung Widi Hatmoko, *Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Tanah Papua*, artikel makalah pada Simposium Nasional Keuangan Negara 2020.

Astika Nurul Hidayah, 2018, *Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, No. 2.

Barda Nawawi Arief, tanpa tahun. *Bahan Kuliah Politik hukum Pidana.Handout*. Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

Chairul Huda, 2011. *Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus*, Jurnal Hukum, No. 4 Vol. 18.



ka, Rizky Nugraha M, Agung Budiono, 2018. *Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam, integritas*, Jurnal Anti Korupsi, Vol.5.No 2.

- Hariman Satria, 2020. *Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik*, Jurnal INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Vol. 6. No 2.
- Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, 2022, *Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital*, Jurnal Sapientia et Virtus | Vol. 7. No. 2.
- Jo. Carrillo, 2007. *Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman*, Southern California Interdisciplinary Law Journal 17.
- Patricia Pasapan dkk, 2022, *Delik Adat dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum TATOHI, Vol.2.No.2.
- Pidato Kofi Anan dalam Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) di Merida, Meksiko, 2003.
- Rif'ah, 2015. *Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan*, Jurnal Justitia Islamica, Vol. 12.No.1.
- Romli Atmasasmita, *Independensi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum*, makalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Suharyo, 2018. *Otonomi Khusus Di Aceh Dan Papua Di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18 No. 3.
- , 2019, *Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Di Papua Dalam Negara Kesejahteraan*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 8 No. 3.

Laporan, Kajian

- “Pendapat BPK Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Pada Provinsi Papua Dan Papua Barat 2021”, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jakarta, 2021.
- “Kajian Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Papua Barat Dan Provinsi Aceh”, Komisi II DPR RI. dikutip dari:
https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/bpkdspd_Analisa_Pengelolaan_&_Pertanggungjawaban_Dana_Otsus_Prov._Papua,_Papua_Barat_&_NAD20130304142912.pdf



abar dan Internet

“Daftar 3 Kepala Daerah di Papua Dijerat KPK Jadi Tersangka Korupsi, Libatkan Swasta hingga Anak Buah”, tribunnews.com (20/09/2022), pukul 19:59 WIB.

“Deretan Skandal Lukas Enembe, dari Dugaan Korupsi hingga Judi”, Kompas.com (26/09/2022) pukul 06:15 WIB.

“Deretan Tokoh Papua Dukung KPK Berantas Koruptor di Papua”, suaranewspapua.com (12/01/2023).

“Dua Faktor Picu Masih Rendahnya Upaya Pencegahan Korupsi di Papua”, Kompas.id (11/05/2023).

“Eks Gubernur Papua Barnabas Suebu Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin”, Tempo.co (18/07/2022).

“Ini Alasan Pemuda Papua Dukung KPK Berantas Korupsi di Bumi Cenderawasih: Demi Kesejahteraan Rakyat”, papua.tribunnews.com (12/6/2022).

“Komunitas Masyarakat Papua Gelar Demo Dukung KPK Jemput Paksa Lukas Enembe”, Kompas.tv (5/10/2022).

“KPK Pilih Kampung Nendali Kabupaten Jayapura Jadi Calon Desa Antikorupsi 2023”, papua.tribunnews.com (31/03/2023).

“KPK Sebut Korupsi Dana Desa Masuk 3 Kasus Terbanyak dalam Korupsi Pengelolaan Keuangan” Kompas.com (28/09/2022).

“KPK Tetapkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng sebagai Tersangka Pembangunan Gereja Kingmi Mile”. Kompas.com (8/09/2022) pukul 18:35 WIB.

“Lukas Enembe Dikukuhkan Jadi Kepala Suku Besar Papua”, detik.com (10/10/2022).

“Mahasiswa Papua Apresiasi dan Mendukung Kinerja KPK Berantas Korupsi”, tribunrakyat.com (6/5/2023).

“Mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu Kembali Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Korupsi”, Kompas.com (3/04/2015).

“Mantan Gubernur Papua Divonis 4,5 Tahun Penjara”, Kompas.com (19/11/2015).



anan Kasus Lucas Enembe Jadi Peringatan Bagi Pelaku , Kompas.id (14/01/2023).

n Masyarakat Adat Dan Komunitas Lokal Ikuti Pelatihan an Anti Korupsi”, jayapurakab.go.id (28/03/2023).

“Rakyat Papua Bersatu Dukung KPK Berantas Korupsi”, kaltim.antaranews.com (15/10/2022).

“Survei Indeks Integritas KPK: Papua dan Papua Barat Terendah”. Kompas.com (23/082022) pukul 16:43 WIB.

“Tokoh Adat Keerom Minta Kpk Segera Periksa Lukas Enembe”, antaranews.com (5/10/2022).

“Tokoh Adat Papua Barnabas Nukuboy: Tidak Ada yang Kebal Hukum Termasuk Lukas Enembe”, HarianTerbit.com (28/09/2022).

“Tokoh Adat Papua Kutuk Pelaku Korupsi yang Lecehkan Hak Rakyat”, mediaindonesia.com (01/10/2022).

“Tokoh Adat Tegaskan Masyarakat Adat Papua Dukung KPK”, antaranews.com (18/10/2022).

“Tokoh Agama dan Adat Papua Dukung KPK Bongkar Kasus Korupsi Lukas Enembe”, klikwarta.com (26/09/2022).

“Tokoh Muslim Papua Selatan Dukung KPK dan Polri Berantas Korupsi”, rri.co.id., (11/01/2023).

“UU Otsus Papua Belum Berjalan Sempurna”, Kompas, 10 Maret 2006.

“Wakil Ketua KPK Ajak Organisasi Masyarakat Sipil di Papua Ikut Berantas Korupsi”, seputarpapua.com (22/11/2021).

Padmo Wahyono, 1991. *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*. Majalah Forum Keadilan.No.29/April.

<https://aclc.kpk.go.id/program/desa-antikorupsi/desa-antikorupsi>.

<https://papua.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/12/Hak-Ulayat-Papua.pdf>.

“Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua”, <https://papua.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/12/Hak-Ulayat-Papua.pdf>.

Suroto, H. (16 Januari 2020). “Lebih Dekat Dengan Suku Moi Dari Sorong”. Diakses pada 20 Mei 2023 dari : <https://www.nabire.net/lebih-dekat-dengan-suku-moi-dari-sorong/>.

<https://cms.kpk.go.id/storage/650/Laporan-Tahunan-KPK-2019-Beberapa.pdf>.

ns.kpk.go.id/storage/2646/Laporan-Tahunan-KPK-2020.pdf.

papua.bpk.go.id/pemprov-papua-implementasi-rencana-aksi-han-korupsi-telah-membuahkan-hasil/.



<https://papua.bpk.go.id/pemerintah-provinsi-papua-jerman-tanda-tangani-kesepahaman-cegah-korupsi/>. (23/02/2021).

“BPKP Dorong Sinergi dan Kolaborasi Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Tanah Papua”, (25/11/2021).
<https://www.bpkp.go.id/berita/readunit/37/32807/20/BPKP-Dorong-Sinergi-dan-Kolaborasi-Dalam-Pencegahan-dan-Pemberantasan-Korupsi-di-Tanah-Papua>.

<https://www.papua.go.id/view-detail-berita-8327/kpk-dorong-komitmen-kepala-daerah-tingkatkan-capain-mcp.html>.

<https://papua.go.id/view-detail-berita-3955/undefined>.

<http://pn-jayapura.go.id/home/link/20170810061009879063803598bf8c1683cd.html>

<http://pn-jayapura.go.id/home/link/20170810061009879063803598bf8c1683cd.html>

<http://pn-jayapura.go.id/home/link/20170810061009879063803598bf8c1683cd.html>

<http://pn-jayapura.go.id/home/link/20170810061009879063803598bf8c1683cd.html>

<http://pn-jayapura.go.id/home/link/20170810061009879063803598bf8c1683cd.html>

<https://papua.bpk.go.id/wp-content/uploads/2023/03/Rekening-Pemda-Papua-Dibekukan.pdf>.

<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola-pemerintahan/buku/pengantar-laporan-harta-kekayaan-pejabat-negara-lhkpn>.

<https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/papers-antikorupsi/1434-komitmen-global-indonesia-pada-united-nations-convention-against-corruption-uncac-dan-g20-anti-corruption-working-group-acwg>.

<https://www.transparency.org/en/cpi/2021>

<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=20173>. “BPKP dan APIP se-Papua Barat Kawal Akuntabilitas Dana Otsus”



gkunganhidup.papua.go.id/gi/fckimage/file/animha1.pdf.

apua.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/12/Hak-Ulayat-apua.pdf.

“FGD – Evaluasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh”, diakses di: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=20129>.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/18/papua-provinsi-dengan-tingkat-kemiskinan-tertinggi-di-indonesia>. (18/02/2021) melansir data BPS: 2020.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/16/tingkat-kemiskinan-papua-masih-tertinggi-nasional-pada-maret-2021>.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/18/papua-provinsi-dengan-tingkat-kemiskinan-tertinggi-di-indonesia>.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/22/skor-indeks-pembangunan-manusia-papua-menurun-pada-2020>. (22/09/2021) melansir data BPS: 2021.

“Oknum Penyeleweng Dana Otsus Papua Harus Ditindak Tegas”, dikutip dari:

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33087/t/Oknum%20Penyeleweng%20Dana%20Otsus%20Papua%20Harus%20Ditindak%20Tegas>, 27/5/2021.

Laporan Kinerja Tahunan

Laporan Kinerja POLDA Papua Tahun 2019.

Laporan Kinerja POLDA Papua Tahun 2020.

Laporan Kinerja POLDA Papua Tahun 2021.

Laporan Kinerja Kejati Papua Tahun 2019.

Laporan Kinerja Kejati Papua Tahun 2020.

